Bhayangkari Bantul Bagikan Pohon Sengon

KR-Judiman

Penyerahan bibit sengon di Mapolres Bantul.

BANTUL (KR) - Bhayangkari Cabang Bantul menyelenggarakan 'Bhayangkari Peduli'. Kegiatan dikemas dengan bakti sosial membagikan 1.000 batang bibit pohon sengon untuk 17 Polsek se Bantul, Selasa (9/2).

Bhayangkari Peduli tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan alam di Bantul yang setiap musim penghujan sering terjadi pohon tumbang maupun tanah longsor.

Ketua Bhayangkari Cabang Bantul, Ny dr Ratih Wachyu Tri Budi S MSc SpA, mengungkapkan dengan penanaman pohon sengon ini setidaknya bisa membantu warga di wilayah tugas masing-masing Polsek di Bantul untuk kegiatan penghijauan. "Menggantikan pohon yang tumbang terkena angin ribut," ungkap Ny Ratih.

Selain itu, setelah pohon besar bisa dipanen, batangnya bisa dipergunakan untuk keperluan warga atau dijual untuk menambah pendapatan. Ny Ratih juga mengimbau kepada pengurus Bhayangkari di masing-masing ranting untuk ikut peduli terhadap lingkungan hidup dan membantu menggalakkan edukasi kepada masyarakat dalam upaya melawan pandemi Covid-19, utamanya memasyarakatkan gerakan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, menjaga jarak pisik dan mengurangi mobilitas.

Penyerahan bibit dilakukan Ny Ratih didampingi wakilnya Ny Devi Noer Alam SPsi dan Kasi Budaya Ny Eka Amin Ruwito dan diterima perwakilan Polsek di halaman Mapolres Bantul. **(Jdm/Hrd)-f**

Pemkab Bantul Bubarkan Hajatan di Sitimulyo

BANTUL (KR) - Pada masa Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), Pemkab Bantul terpaksa membubarkan hajatan yang menimbulkan kerumunan dan keramaian. Adapun hal ini terpaksa dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penularan Covid-19 yang makin meluas.

Assek I Setda Pemkab Bantul, Hermawan Setiadji, Rabu (10/2), menuturkan aksi pembubaran dilakukan sebagai upaya penegakan Instruksi Bupati tentang kewaspadaan penularan Covid-19 di Kabupaten Bantul. Pembubaran oleh Tim Satgas Covid-19 yang bersinergi dengan Satpol PP, Polisi, TNI dan stakeholder terkait.

Aksi pembubaran dilakukan di salah satu rumah warga kawasan Ngablak Sitimulyo Piyungan yang tengah mengadakan hajatan dengan dihadiri tamu lebih dari 200 orang.

"Padahal warga ini merupakan salah satu tokoh masyarakat. Dari hasil koordinasi awalnya pemangku hajat meminta kelonggaran waktu untuk bubar namun kami tidak mengizinkan dan meminta hajatan segera dibubarkan," tegas Hermawan.

Sesuai Instruksi Bupati, ketentuan tamu hajatan saat PTKM maksimal dibatasi 50 orang yang merupakan keluarga dekat. Selain itu dalam hajatan harus ada pengaturan jarak dan penerapan prokes ketat.

"Namun pada hajatan ini, tamu yang datang lebih dari 200 orang, tidak ada pengaturan jarak alias menimbulkan kerumunan serta mengadakan hiburan penyerta. Padahal dalam ketentuan tidak boleh ada hiburan pengiring," tegasnya.

Hermawan kemudian meminta kepada warga untuk tetap mentaati prokes dan bersama-sama melawan dan memerangi Covid-19.

"Berjuang melawan Covid-19 bukan hanya tugas pemerintah namun bersama-sama masyarakat. Hendaknya tokoh masyarakat memberi contoh yang baik kepada warganya," tegasnya.

Terkait progres angka penularan Covid-19 selama PTKM, Hermawan menegaskan angka penularan Covid-19 selama berlangsung PTKM pertama dan kedua turun sebesar 4 persen, sementara progres tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Bantul sebesar 2 persen.

"Artinya penerapan PTKM di Bantul ada hasilnya. Kami minta kerjasama seluruh elemen masyarakat bersama memutus mata rantai penyebaran Covid-19," tutupnya. **(Aje)-f**

SRI SULTAN HB X JADI ANGGOTA KEHORMATAN

160 Pengurus DPN Peradi Dilantik

BANTUL (KR) - Sebanyak 160 pengurus DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) periode 2020-2025 dilantik oleh Ketua Umum DPN Peradi Prof Dr Otto Hasibuan SH MM di Balai Sudirman Jakarta, Senin (8/2). Pada kesempatan itu Sri Sultan HB X juga dilantik sebagai Anggota Kehormatan Peradi Pusat.

Wakil Ketua Umum I Peradi masa bhakti 2020-2025, Dr Achiel Suyanto SH MBA, Rabu (10/2), mengungkapkan selain dirinya, tokoh penegak hukum dari Yogya yang juga dilantik antara lain Prof Dr Nindyo Pramono SH MS (UGM) sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, Prof Dr Paripurna SH LLM (UGM) sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat, Prof H Jawahir Thantowi SH MHum Phd (UII) dan Dr H Arief Setiawan SH M Hum (UII) sebagai anggota Dewan Pakar dan ada juga anggota Korwil DIY.

Pada pelantikan yang dihadiri Wakil Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI, Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Prof Dr Eddy OS Hieraj SH MHum berkesempatan memberikan sambutan secara langsung. Selain itu, Wakil Presiden RI dan Anggota Kehormatan Peradi Pusat Sri Sultan HB X juga memberikan sambutan secara virtual.

Pelantikan yang juga diikuti oleh seluruh pengurus 133 DPC Peradi se-Indonesia yang dilakukan secara Virtual itu berlangsung tertib dengan tetap menjaga protokol kesehatan serta diawasi oleh Tim Satgas Covid-19 serta semua peserta dan tamu undangan sebelum memasuki ruang pelantikan diperiksa terlebih dahulu kondisi kesehatan dengan peralatan yang disediakan oleh panitia berpakaian Hazmat lengkap. "Sejak awal kami menjaga betul protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19," jelas Achiel.

Sementara itu Ketum Peradi Otto Hasibuan menekankan agar seluruh pengurus melaksanakan 5 visi Program (Panca Program) Utama yakni menegakkan kode etik profesi, mempertahankan prinsip organisasi sebagai *singel bar*, melaksanakan bantuan hukum Probono, tetap menjaga pergaulan Advokat secara internasional dan menjaga harkat dan martabat sebagai penegak hukum. **(Zie)-f**

WILAYAH BANTUL TERUS DIGUYUR HUJAN

Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

BANTUL (KR) - Hujan yang terjadi terus menerus di wilayah Bantul seperti yang terjadi sejak Selasa hingga Rabu (9-10/2), perlu diwaspadai dan diantisipasi karena bisa berdampak banjir dan tanah longsor.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Drs Dwi Daryanto MSi, Rabu (10/2), hujan yang terus-menerus bisa menjadikan lahan terutama di wilayah perbukitan menjadi gembur atau melunak sehingga mudah terjadi longsor. Kondisi tersebut bisa terjadi di wilayah Dlingo, Piyungan, Imogiri, Pundong dan lainnya.

"Yang perlu diwaspadai terkait cuaca ekstrem di puncak musim penghujan sekarang ini adalah terjadinya banjir, tanah longsor dan angin ribut," ungkap Dwi Daryanto.

Kesiapan untuk menghadapi potensi ancaman bencana Hidrometeorologi di tingkat desa telah meningkatkan dan mengaktifkan Posko sebagai wujud sinergitas pemerintah, masyarakat dan relawan.

Sedangkan di tingkat kabupaten telah mempersiapkan sarana dan prasarana (Sarpras) yang ada terkait potensi ancaman bencana tersebut bersama TNI-Polri dan OPD terkait. Dwi Daryanto juga meminta kepada semua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di masing-masing kalurahan se-Bantul untuk meningkatkan kewaspadaannya. Sehingga kapanpun ada kejadian langsung beraksi.

Dwi Daryanto MSi juga mengungkapkan potensi banjir di Kabupaten Bantul merata. Hal ini lantaran Kabupaten Bantul dilewati sungai besar di DIY, seperti Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Gajah Wong dan Sungai Code.

Untuk mengantisipasi banjir, BPBD berkomunikasi dengan Pemkab Sleman dan Pemkot Yogya. Ini karena hulu sungai besar-besar ini bertempat di Sleman dan Kota Yogya melewati Bantul. "Kami intens komunikasi dengan Sleman dan Yogyakarta. Kalau misalnya Bantul tidak hujan, tapi Sleman hujan deras, bisa saja banjir. Jadi kami lakukan komunikasi terus," ujarnya. **(Jdm/Aje/Roy)-f**

Pengurus IPHI Potorono Dilantik

KR-Istimewa

Para pengurus Ranting IPHI Potorono yang dilantik.

BANTUL (KR) - Pengurus Ranting Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kalurahan Potorono Banguntapan Bantul dilantik oleh Ketua IPHI Kapanewon Banguntapan, H Suwandi Astadi SPd, di Pendopo Potorono, Minggu (7/2). Acara dihadiri pejabat dari Kapanewon Banguntapan, Lurah Potorono Prawata dan undangan.

Pengurus periode 2021/-2025 Ranting IPHI Potorono dengan Pembina/-Penasihat: Ketua H Harun Rasyid. Anggota Lurah Potorono, H Munawwir, H Ridlo Hisyam, H Akhmad Khamim.

Sebagai Ketua H Syaifuddin. Wakil H Kartono. Sekretaris Sabar Nurohman. Wakil H Mujiman, Bendahara H Suparmin, Wakil H Jazamah RH. Sedang Bidang Organisasi dan Kelembagaan HA Lutfi, H Sukirno, H Jumari, H Suparjo,H Azari. Bidang Pendidikan dan Dakwah H Cahyadi Takariawan, H Rahmat Prahara, Hj Karni. H Nurhidayat dan H Wardana.

Bidang Sosial, Kesehatan dan Lingkungan Hj Irena Agustungtyas, Hj Siti Badriyah, Hj Muron Murilah, H Sukardi, H Kawit Raharjo. Bidang Ekonomi dan Koperasi H Bashor, Hj Nung Hermini, Hj Kasinah, H Sariman, H Heru Priyatno. **(Fie)-f**

KEGIATAN KAMPUS MENGAJAR DI MASA PANDEMI

Penguatan Pembelajaran SD dengan Libatkan Mahasiswa

JAKARTA (KR) - Kampus Mengajar digelorakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ini merupakan kegiatan mengajar di sekolah yang merupakan bagian dari program Kampus Merdeka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menjelaskan tujuan diadakannya Kampus Mengajar adalah pertama, untuk menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi. Kedua, membantu pembelajaran di masa pandemi, terutama untuk SD di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Penyelenggaraan program ini sendiri adalah atas dukungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Tantangan yang kita hadapi sangatlah besar, khususnya bagi adik-adik kita yang duduk di bangku Sekolah Dasar. Melalui Kampus Mengajar 2021, saya ingin menantang adik-adik mahasiswa untuk juga mengatakan "SAYA MAU!" Yakni mau membantu mengubah tantangan tersebut menjadi harapan," ungkap Mendikbud ketika meluncurkan program Kampus Mengajar secara daring di Jakarta, Selasa, (9/2) petang.

Lebih lanjut, Mendikbud juga mengajak teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk beraksi, berkolaborasi, dan berkreasi selama dua belas minggu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah Dasar, terutama yang berada di daerah 3T, sekaligus mengasah kepemimpinan, kematangan emosional, dan kepekaan sosial.

Di akhir sambutannya, Mendikbud juga menekankan agar perguruan tinggi dan dosen mendukung mahasiswanya untuk mengikuti program Kampus Merdeka dan mempermudah konversi SKS, karena Kampus Merdeka adalah hak mahasiswa untuk belajar di luar kampus atau prodinya.

KR-Istimewa

Nadiem Anwar Makarim saat memberikan penjelasan tentang kegiatan Kampus Mengajar.

Melanjutkan Mendikbud, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, menyambut baik program yang digagas oleh Kemendikbud dalam kerangka program Kampus Merdeka ini. "Besar harapan kami, para mahasiswa penerima beasiswa akan dapat memberikan kontribusi atas permasalahan nyata yang dihadapi dunia pendidikan akibat dari dampak pandemi Covid-19," ujar Rionald ketika menyampaikan aspirasinya akan program Kampus Mengajar, yang merupakan buah kerjasama antara Kemendikbud dan LPDP.

"Akhir kata, kami dari LPDP mengucapkan selamat mengabdi kepada ibu pertiwi melalui program Kampus Mengajar ini, selalu jaga diri dalam situasi pandemi serta jaga nama baik Kemendikbud dan LPDP di mana pun berada," tutur Rionald mengakhiri sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, kemudian memberikan paparan lebih detail mengenai program Kampus Mengajar. Selain manfaat bagi mahasiswa yang telah disampaikan Mendikbud, Nizam menjelaskan, bahwa dalam program Kampus Mengajar ini mahasiswa akan mendapatkan bantuan potongan UKT, bantuan biaya hidup, dan konversi SKS sampai dengan 12 SKS.

Dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19, Nizam menekankan, "Kampus Mengajar akan mencari mahasiswa-mahasiswa yang berdomisili dekat dengan SD sasaran, sehingga program ini tidak akan menyebabkan terjadinya mobilisasi mahasiswa". Di samping itu, mahasiswa juga berperan sebagai duta edukasi perubahan perilaku khususnya dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Adapun keuntungan terbesar yang diperoleh bagi perguruan tinggi dari program ini adalah mendukung perguruan tinggi untuk mencapai indikator kinerja utama (IKU) #2, yaitu banyaknya jumlah mahasiswa yang mendapatkan pengalaman di luar kampus.

Selain itu, papar Nizam, perguruan tinggi swasta (PTS) tidak perlu khawatir akan kehilangan pemasukan, karena PTS akan tetap dapat memberlakukan uang kuliah semesternya. Untuk para dosen yang mendaftar dan terpilih sebagai dosen pembimbing, akan mendapat insentif dan sertifikat pembimbing kegiatan.

Di akhir acara, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Jumeri, memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan program Kampus Mengajar. Jumeri menekankan, agar program ini dapat dimanfaatkan sebagai momen saling berbagi pengalaman, bukan hanya satu arah dari sekolah ke mahasiswa, tetapi juga dari mahasiswa ke sekolah, bahkan ke komunitas orang tua, atau komunitas KKG. "Kata kunci yang harus tercipta adalah 'kolaborasi'. Yakni kolaborasi antara guru dan mahasiswa untuk menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran, supaya adik-adik SD, terutama di daerah 3T bisa terbantu belajarnya selama masa pandemi ini," imbuh Jumeri.

Jumeri menyampaikan kepada para kepala dinas agar dapat menerima mahasiswa di satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya, dengan memberikan bimbingan dan bantuan supaya mereka lancar menjalankan misinya. Jumeri berharap agar kehadiran para mahasiswa dapat dioptimalkan sebaik mungkin kebermanfaatannya; supaya para mahasiswa ini dapat menjadi partner diskusi, brainstorming, problem solving dan motivator bagi para guru maupun siswa.

"Kedatangan mahasiswa menjadi energi besar bagi anak-anak kami di SD untuk memotivasi mereka, membangkitkan semangat dalam mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Percayalah, adik-adik mahasiswa, Anda ditunggu di lapangan. Kiprah, dedikasi, dan kemampuan Anda ditunggu anak-anak kita yang ada di lapangan," tambahnya. **(Ati)-f**

Pak Asmuni Menjawab

Fatwa MUI Tentang Halal (4-Habis)

TANYA:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang mengeluarkan fatwa atau label halal atas produk makanan, pengobatan dan kesehatan. Berkait dengan fatwa MUI tentang produk vaksin Covid-19, kami berharap Bapak bersedia menjelaskan tentang kewenangan tersebut, sehingga kami dapat memahaminya.

***Cahyono**, Bantul*

JAWAB:

Berkaitan dengan panduan, sistem dan dalil yang telah saya kemukakan, dalam pelaksanaannya LP POM MUI melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

(1). Mengumumkan agar perusahaan yang menginginkan makanan, obat-obatan atau kosmetika produknya diberi label halal, mengajukan pendaftaran kepada LP POM MUI. (2). Produsen menyampaikan keterangan dengan surat tentang bahan makanan, obat-obatan atau kosmetika itu secara jelas dan jujur. (3). LP POM MUI memeriksa makanan, obat-obatan atau kosmetika tersebut apakah bahan-bahannya, campurannya, cara pengolahannya baik dan dibenarkan menurut syariat.

(4). Pemeriksaan dilakukan oleh auditor baik dari luar maupun anggota LP POM MUI sendiri yang mempunyai keahlian untuk memeriksa yang diminta oleh produsen, bahkan kalau perlu diuji di laboratorium. (5). Setelah hasil pemeriksaan selesai dan memenuhi syarat halal, sertifikat halal akan diberikan untuk makanan, obat-obatan atau kosmetika yang diminta produsen. (6). Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau campuran baru dalam memproduksi yang tadinya telah dinyatakan halal, produsen diwajibkan segera melapor ke LP POM MUI untuk diperiksa kehalalannya.

(7). Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kehalalan produk, auditing dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila memang diperlukan. Apabila terjadi pelanggaran yang sengaja oleh produsen, LP POM MUI akan memberi peringatan pertama sampai pencabutan sertifikat halal apabila pelanggaran tetap dilakukan.

Demikianlah jawaban saya atas pertanyaan Saudara. Semoga uraian tersebut bermanfaat bagi Saudara dan para pembaca.* **-f**